

LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

A. Latar Belakang

1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah

B. Konsepsi

Konsepsi Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang disampaikan pada tanggal 21 Februari 1957 berisi:

1. Bahwa Demokrasi Liberal secara barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin
2. Dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai ditambah dengan golongan fungsional.
3. Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dari masyarakat

C. Keluarnya Dekrit

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdiri dari:

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

D. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.

3. Pembentukan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukan Front Nasional melalui penetapan Presiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah:
 - a. Menyelesaikan Revolusi Nasional
 - b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional
 - c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya.
5. Pembentukan DPRGR
Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun 1960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK
Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GNHN dengan Ketetapan MNPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekarno intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekarno yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

E. Keadaan Ekonomi

Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sector. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontrol. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.

F. Politik Luar Negeri

1. Indonesia berpartisipasi aktif dalam mcrintis pendirian Gerakan Non Blok sehingga terlaksana KTT Non Blok 1 di Beograd Yugoslavia pada tahun 1961.
2. Pelaksanaan politik luar negeri NEFO (New Emerging Forces). Politik NEFO-OLDEFO ditempuh Presiden Soekarno dengan Menlu Dr. Soebadrio bertujuan melakukan konfrontasi terhadap OLDEFO (Old Established Forces). Indonesia dan Negara-negara komunis termasuk Blok NEFO berhadapan dengan Negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang termasuk Blok OLDEFO.
3. Konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1934 yang isinya : (1) Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia (2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari Nekolim Malaysia. Akibat Konfrontasi dengan Malaysia Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB pada 7 Januari 1965.

PEMILU PERTAMA

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946 belum terlaksana terus karena setelah Indonesia merdeka negara dihadapkan pada ancaman baik dari NICA maupun gangguan dari dalam negeri. Setelah kita berdaulat secara penuhpun Pemilu belum juga dapal dilaksanakan karena mengalami kesulitan untuk melaksanakanya akibat sering berganti-gantinya cabinet. Baru pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap Pemilu dapat dilaksanakan.
2. Sistem yang dipergunakan menurut UU No. 7 tahun 1953 adalah sistem proporsional dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada partai-partai politik yang ada terutama partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR dan Konstituante.
3. Dalam Pemilu I dilakukan dua kali pemungutan suara yakni : a). untuk memilih anggota DPR dan b). memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar.

4. Kampanye Pemilu 1955 sudah dilakukan sejak kabinet Ali Sastroamidjojo 1 berkuasa atau dua tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Tema kampanye yang diketengahkan didominasi oleh perdebatan antara partai pemerintah dengan partai-partai oposisi dan persoalan-persoalan mengenai ideology kepartaian.
5. Pada 29 September 1955 diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR untuk diperebutkan 272 Kursi. Dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante yang berjumlah 542 orang.
6. Dalam Pemilu 1 ini muncul empat partai politik yang meraih suara terbanyak yaitu :

Nama Partai	Jumlah Kursi	
	DPR	Konstituante
PNI	57	119
Masyumi	56	112
NU	45	91
PKI	45	80

KONFRENSI ASIA AFRIKA

➤ **Konferensi Pendahuluan**

1. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada 28 April – 20 Mei 1954. Membicarakan perjuangan rakyat Vietnam melawan penjajahan Perancis.
2. Konferensi Bogor, dilaksanakan pada 28-29 Desember 1954. Tercapai kesatuan pandangan untuk mengadakan Konferensi bangsa-bangsa Asia Afrika di Bandung.

➤ **Latar Belakang KAA**

1. Terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur
2. Masih banyaknya Negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum merdeka
3. Lemahnya persatuan dan solidaritas antar negara-negara yang berkembang

➤ **Pelaksanaan KAA**

1. Dilaksanakan dari tanggal 18-25 April 1955 di Bandung
2. Pembukaan KAA dimulai pukul 09.00 WIB tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung oleh Presiden Soekarno.
3. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.
4. Peserta yang diundang sebanyak 30 negara yang hadir sebanyak 29 negara dari kawasan Asia Afrika.
5. Menghasilkan piagam yang disebut Dasa Sila Bandung (Bandung Declaration)

➤ **Pengaruh KAA**

1. Mengilhami Negara-negara yang masih terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan mempengaruhi pendapat internasional di PBB.
2. Meningkatkan kerjasama dan semangat solidaritas di kalangan bangsa-bangsa Asia Afrika
3. Medasari terbentuknya Gerakan Non Blok

PROGRAM BENTENG

1. Pembatasan Impor dan pemberian lisensi bagi importir Indonesia
2. Pemberian kredit bagi importir Indonesia
3. Perusahaan Benteng harus memiliki modal minima 70% dari pengusaha pribumi
4. Import Benteng diseleksi melalui menteri perekonomian :
 - Pengusaha Baru di sektor impor
 - Mempunyai status hokum
 - Modal minimal Rp.100 000 menjadi Rp.250.000 (1953)
 - Mempunyai kantor dan pegawai yang memadai

Dua Fase Program Benteng

Fase pertama, masa kekuasaan tiga kabinet pertama yang terdiri dari golongan moderat (Masyumi, PNI danPSI)

1. Rasionalitas dan Realitas dalam merencanakan kebijakan
2. Efisiensi memperkecil pengeluaran dan anggaran belanja secara realitas
3. Konsolidasi Bank dan menggalakkan Koperasi
4. Pembangunan industri-Impor

Fase kedua, terbentuknya kabinet yang didominasi oleh sayap nasionalis radikal dari PNI (Kabinet Ali Sastroamidjojo)

1. Menaikkan posisi Indonesia
2. Indonesiasi yang lebih tegas dengan menaikkan alokasi impor 80-90% dari hanya 37,9%.
3. Munculnya Model Ali Baba – Korupsi.
4. Pengangkatan pegawai negeri dari Jawa ditempatkan di luar Jawa.
5. Pengusaha Benteng hanya 700 pada masa Kabinet Natsir

Mulai tahun 1954 Infalasi meningkat tinggi, mata uang Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang tidak proposional. Nilai di pasar bebas merosot tajam, laju inflasi rata-rata Rp. 1140 terhadap Dolar AS menjadi Rp. 2350 pada bulan Juni 1953, Rp.2700 pada bulan Juni 1954 dan Rp.4600 pada bulan Juni 1955. Indeks harga dari 44 jenis barang impor di Jakarta meningkat sekitar 59,5%. Harga beras melonjak 42,3% antara bulan Agustus 1953-Juni 1955.

Selain itu juga harga komoditi ekspor utama yaitu karet dan minyak. Banyaknya pasar gelap dan pembiayaan Operasi Militer.